

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penyuluhan

2.1.1.1 Definisi Penyuluhan

Penyuluhan berasal dari kata “suluh” yang artinya memberi keringanan. Penyuluhan merupakan suatu proses demokratis yang pelaksanaannya harus memberikan ruang bagi kebebasan berpikir, berdiskusi, memecahkan masalah, serta merencanakan dan bertindak secara bersama. Lebih lanjut, penyuluhan bersifat berkelanjutan, artinya proses ini harus dimulai dari kondisi masyarakat pada saat itu menuju tujuan yang dicita-citakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan yang terus berkembang (Noor, 2012, p. 4).

Penyuluhan juga berfungsi sebagai upaya untuk menyebarluaskan inovasi agar masyarakat tertarik dan terdorong untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, penyuluhan merupakan salah satu jenis kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan keterampilan baru kepada masyarakat, sehingga dapat mengembangkan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan (Raishasweetmore, 2013).

Penyuluhan merupakan satu proses yang mana memiliki tujuan untuk dapat merubah kebiasaan seseorang, adapun proses dari perubahan tersebut didapatkan melalui edukasi, komunikasi, motivasi dan penyebaran informasi oleh seorang penyuluh baik itu disampaikan secara langsung melalui ceramah ataupun peragaan serta melalui tulisan (Febriyanti & dkk, 2020, p. 129).

A.W van den Ban, dkk. (1999) berpendapat pengertian bahwa penyuluhan merupakan upaya seseorang untuk berkomunikasi secara sengaja dengan maksud membantu orang lain mengungkapkan pendapatnya sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat (Hidayati, 2014, p. 103).

Mardikanto (1993) memberikan pendapat bahwa penyuluhan merupakan suatu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi, pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi (Sasongko, 2011, p.12). Penyuluhan dalam konteks yang lebih luas

menurut Setiana (2005) dalam Janar (2018, p.7) adalah suatu disiplin ilmu sosial yang mengkaji sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat untuk mencapai perubahan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ahli lain berpendapat bahwa penyuluhan hubungan yang melibatkan dua tipe individu dimana salah satunya adalah klien yang diberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan dan dirinya sendiri. Interaksi antara klien dan penyuluh ini mencakup proses wawancara untuk bertukar informasi, kegiatan pelatihan ataupun pembelajaran, upaya untuk memperkuat kematangan serta bantuan dalam pengambilan keputusan dan upaya penyembuhan, Robinson (1950) dalam (Surya, 1998, p. 113). Dijelaskan lebih lanjut oleh Wiriadmaha dalam Hamdan, Agniatunnisa & Maulana (2022, p.63) penyuluhan merupakan suatu sistem pendidikan nonformal yang mana didalamnya masyarakat dapat belajar serta didorong untuk secara aktif menjadi mau, tahu dan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara baik menguntungkan dan memuaskan.

Lebih jelas dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 penyuluhan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi penyuluh serta sasaran agar mereka mau serta mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan pada beberapa pengertian yang telah di jabarkan di atas, dalam penelitian ini ditujukan pada penyuluhan mengenai bank sampah sebagai upaya edukatif bagi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Masyarakat dapat menerima berbagai macam pengetahuan baru mengenai bank sampah dan bagaimana cara pengelolaannya. Dalam kegiatan ini pula diharapkan masyarakat tidak hanya menerima informasi tetapi juga dapat menerapkan dan mengimplementasikan informasi yang telah diterima.

2.1.1.2 Fungsi Penyuluhan

Selaras dengan pengertian penyuluhan yang telah disampaikan sebelumnya, penyuluhan memiliki fungsi yaitu dengan adanya perubahan dari tindakan manusia yang terdahulu menuju kepada yang sekarang. Ray (1998) menyebutkan mengenai bentuk perubahannya yaitu dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, pemahaman, tujuan, tindakan serta kepercayaan diri (Siswanto, 2012, p. 55).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, yang terdapat pada Pasal 4 fungsi sistem penyuluhan meliputi:

- 1) memfasilitasi proses pembelajaran antara penyuluh dengan sasaran;
- 2) mengupayakan kemudahan akses sumber informasi, teknologi dan sumber daya bagi penyuluh dan sasarannya sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya;
- 3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan bagi penyuluh serta sasaran;
- 4) membantu penyuluh serta sasaran dalam mengembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan;
- 5) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi penyuluh serta sasaran dalam mengelola usaha;
- 6) menumbuhkan kesadaran penyuluh serta sasaran terhadap kelestarian fungsi lingkungan;

Isbandi (2005) dalam Nasir (2018, p. 13) menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi dari proses pendidikan non-formal (penyuluhan) diantaranya:

- 1) Sebagai alat atau wadah untuk menyebarkan ide maupun gagasan baru.
- 2) Jembatan komunikasi antara lembaga penelitian, pemerintah serta penerima manfaat.
- 3) Mengartikulasikan ide atau gagasan baru dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami.
- 4) Mengubah perilaku sebelumnya menjadi perilaku yang baru.

Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan menggunakan metode yang telah disesuaikan dengan kondisi pelaku penyuluhan.

2.1.1.3 Prinsip Penyuluhan

Mathews berpendapat bahwa prinsip merupakan suatu rumusan mengenai kebijakan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan secara konsisten (Mardikanto, 2019, p. 78). Dengan begitu prinsip tersebut akan bersifat umum, dapat diterima secara luas dan dapat pula dibuktikan kebenarannya melalui berbagai observasi dalam berbagai konteks. Oleh karena itu prinsip dapat menjadi landasan yang tepat bagi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Tak terkecuali pada kegiatan penyuluhan, terdapat beberapa prinsip penyuluhan yang dikemukakan oleh ahli. Seperti halnya yang disampaikan oleh Dahama Bhatagar (1980) dalam Hidayati (2014, p. 97) memaparkan bahwa prinsip prinsip penyuluhan diantaranya adalah:

- 1) Minat dan kebutuhan, penyuluhan dapat berjalan secara efektif apabila ateri penyuluhan tersebut sesuai dengan minat serta kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini didapatkan melalui proses pengkajian hingga benar benar bisa mengetahui apa saja yang menjadi daya tarik suatu individu maupun sekelompok masyarakat serta dibutuhkan di lingkungan tersebut disesuaikan pula dengan sumber daya yang terdapat di lingkungan.
- 2) Organisasi masyarakat bawah, penyuluhan dapat berjalan efektif apabila dapat mengikutsertakan serta berinteraksi dengan organisasi masyarakat bawah, dimulai dari lingkungan keluarga.
- 3) Keragaman budaya, penyuluhan harus peka terhadap keragaman budaya. Pada proses penyuluhan diperlukan adanya penyesuaian dengan budaya lokal yang amat beragam, walaupun dilain sisi hal ini terkadang menjadi penghambat dalam kegiatan penyuluhan.
- 4) Perubahan budaya, kegiatan penyuluhan memiliki potensi untuk mempengaruhi perubahan budaya. Karenanya, pelaksanaan penyuluhan harus dilakukan dengan hati-hati serta bijak supaya perubahan yang terjadi tidak menimbulkan rasa tidak nyaman pada budaya. Maka dari itu penyuluh

harus memahami dengan selama nilai-nilai budaya setempat seperti tradisi, dan yang lainnya.

- 5) Kerjasama dan partisipasi, penyuluhan akan efektif apabila mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mengaplikasikan program-program yang telah direncanakan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai alternatif ilmu yang diinginkan.
- 6) Belajar sambil bekerja, pada kegiatan penyuluhan diusahakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau memetik pelajaran dari pengalaman langsung dalam berbagai kegiatan yang dijalannya. Hal tersebut memiliki arti bahwa penyuluhan tidak hanya menginformasikan teori-teori, namun selain itu juga memberikan kesempatan bagi masyarakat agar mencoba sendiri.
- 7) Kepemimpinan, penyuluh dianjurkan untuk dapat membangkitkan pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin untuk dapat membantu kegiatan penyuluhan.
- 8) Kepuasan, penyuluh diharapkan dapat mencapai kepuasan, karena dengan adanya kepuasan sendiri dapat menentukan partisipasi dari sasaran program penyuluhan selanjutnya.

2.1.1.4 Tahap Penyuluhan

Dalam kegiatan penyuluhan terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, Pratiknyo (2022) menjelaskan tahapan dari penyuluhan yaitu:

- 1) Tahap persiapan penyuluhan
 - a. Melakukan prakondidi yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat serta mengidentifikasi bagaimana permasalahan dan kebutuhan tersebut dapat diatasi. Tahapan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan sosial dan permasalahan yang dihadapi di tempat yang telah ditentukan melalui pemetaan sosial, observasi dan refleksi diri. Melalui pemetaan sosial, kita dapat memvisualisasikan secara detail situasi suatu kota atau

kabupaten, termasuk kebutuhan layanan sosial (SWSS), serta kapasitas dan sumber daya layanan sosial lokal (SWSS). Dengan cara ini, bisa ditentukan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat.

- b. Penyusunan rencana penyuluhan dengan mencakup pendekatan 5W+1G+2M+1L meliputi beberapa aspek penting. Pertama, rencana penyuluhan harus jelas mengenai jenis penyuluhan yang akan dilaksanakan (*what*) alasan melakukannya (*why*) dan tujuan yang diinginkan (*goal*). Kedua, metode yang digunakan untuk penyuluhan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat secara efektif memenuhi target kebutuhan (*how*). Selain itu, lokasi penyuluhan (*where*) dan periode pelaksanaan, termasuk tahun, bulan, tanggal dan durasi kegiatan (*when*), harus ditentukan dengan tepat. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyuluhan juga harus jelas mengenai tujuan konsultasi dan pelaksana (*who*) yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Selanjutnya, penyuluh harus memastikan bahwa media yang digunakan (*media*), seperti alat bantu dan alat harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penyuluhan. Terakhir, komponen pendukung lainnya seperti sumber daya dan strategi implementasi yang lebih rinci harus dipertimbangkan untuk memastikan komponen tersebut berfungsi dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.
- c. Penyusunan materi dalam penyuluhan dapat dilakukan dengan menyesuaikan sasaran penyuluhan, baik kepada individu, keluarga, kelompok atau organisasi, maupun masyarakat secara luas. Materi penyuluhan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan berbagai alat bantu dan media peraga guna meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Dalam proses penyusunannya, diperlukan diskusi serta konsultasi dengan pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang terkait agar materi yang disampaikan akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan sasaran penyuluhan.

- d. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait merupakan langkah penting dalam memastikan kelancaran penyuluhan sosial. Koordinasi ini dilakukan secara berjenjang dengan pemangku kepentingan (stakeholder) yang relevan sebagai bagian dari manajemen persiapan penyuluhan. Proses ini mencakup berbagai aspek administratif dan teknis, seperti pengelolaan surat-menyurat, pengajuan permohonan narasumber ahli, konsultasi terkait materi penyuluhan, serta hal-hal lain yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

2) Tahap pelaksanaan penyuluhan

- a. Mempersiapkan media serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan penyuluhan sosial guna mendukung efektivitas penyampaian materi dan kelancaran kegiatan.
- b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial dengan menerapkan metode dan teknik yang telah dirancang sebelumnya guna memastikan efektivitas dan pencapaian tujuan penyuluhan.
- c. Melaksanakan penyuluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memanfaatkan media dan alat bantu yang sesuai untuk individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat secara luas.

3) Tahap tindak lanjut

- a. Merancang rencana tindak lanjut dengan kelompok sasaran yang fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- b. Rencana tindak lanjut tersebut dapat berupa langkah-langkah nyata dan konkret sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan serta memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi.

2.1.1.5 Indikator Penyuluhan

WHO (2002) menjabarkan mengenai pengertian indikator, yaitu faktor yang dapat memudahkan menilai perubahan secara langsung maupun tidak langsung (Utami, 2018, p. 21). Berlandaskan teori Febriyanti & dkk (2020, p. 89) mengenai penyuluhan didapatkan indikator penyuluhan diantaranya edukasi, komunikasi dan motivasi.

- 1) Edukasi, merupakan proses dimana individu atau kelompok berusaha untuk memperoleh pemahaman sehingga dapat mengembangkan keterampilan berpikir yang matang dan berkelanjutan terkait topik maupun konteks tertentu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran dan pelatihan (Gunawan, 2021, p. 130). Dalam penyuluhan ini edukasi yang dimaksud adalah pengetahuan baru atau pemahaman pada sesuatu yang baru agar masyarakat yang mengikuti penyuluhan dapat menyelesaikan permasalahan tertentu.
- 2) Komunikasi, menurut Afriyadi (2015) dalam Azzahra, Wolor, & Marsofiyanti (2023, p. 93) berarti suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan maupun informasi yang dilakukan oleh pemberi informasi (komunikator) kepada penerima informasi (komunikan) dengan maksud serta tujuan tertentu. Pada penyuluhan dipastikan adanya komunikasi yang berarti komunikasi tersebut adalah proses transfer pengetahuan, pada penyuluhan ini informasi yang disampaikan adalah informasi mengenai bank sampah mulai dari bagaimana cara mendirikan bank sampah hingga bagaimana cara mengelola sampah.
- 3) Motivasi, Hasibuan (2010) dalam Dewi Fitri Yeni (2022, p. 135) menyatakan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan yang dapat mencakup pada keinginan untuk bertindak pada setiap motivasi memiliki tujuannya tersendiri.

2.1.2 Bank Sampah

2.1.2.1 Definisi Bank Sampah

Secara istilah bank sampah terdiri dari dua kata yaitu bank dan sampah. Bank menurut Kamsir dalam Solehudin (2017, p. 37) merupakan suatu lembaga pada bidang keuangan yang mana berkegiatan utama pada menghimpun dana yang berasal dari masyarakat lalu menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan jasa Bank yang lain. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 definisi bank yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan pada definisi bank tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang dapat melayani masyarakat dalam hal keuangan serta jasa bank yang lain dengan cara menghimpun dana dari masyarakat serta disalurkan kembali kepada masyarakat.

Sedangkan definisi dari sampah menurut Mochtar (1987) dalam Rahayu Herwina, & Novitasari (2022, p. 23) adalah barang sisa bekas kegiatan manusia atau sesuatu yang sudah tidak dipakai lalu dibuang. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 menjelaskan mengenai sampah “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.”

Berdasarkan pada Peraturan Menteri LHK, bank sampah memiliki arti sebagai fasilitas yang dirancang untuk mengelola sampah melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman, mengubah perilaku terhadap pengelolaan sampah serta mendorong akan penerapan ekonomi sirkular.

Sejalan dengan pengertian tersebut Ulfah, dkk. menyatakan bahwa bank sampah merupakan suatu upaya untuk mengelola serta memilah sampah secara efisien, baik organik maupun anorganik, sehingga nasabah dapat memperoleh keuntungan tergantung terhadap jenis sampahnya (Mawarni, 2021, p. 43).

2.1.2.2 Tujuan Bank Sampah

Tujuan utama dari didirikannya bank sampah adalah untuk dapat membantu proses penanganan pengelolaan sampah, selain itu juga untuk dapat meningkatkan kesadaran akan kebersihan, ketertiban dan kesehatan lingkungan di masyarakat. serta tujuan lain dari bank sampah ini adalah untuk mentransformasikan sampah dalam konteks sosial dan ekonomi menjadi bahan yang bernilai lebih tinggi, seperti pengelolaan sampah melalui pemanfaatannya untuk kerajinan maupun pupuk, hal tersebut dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan (kelurahan-purwosari.kuduskab.go.id).

Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bank sampah adalah untuk mengurangi sampah dengan cara mengelola sampah tersebut yang mana hasil

dari pengelolaan sampah tersebut dapat membantu perekonomian warga setempat. Selain dalam bidang ekonomi, lingkungan sekitar pun akan terasa lebih sehat serta terawat dengan adanya pengelolaan sampah melalui bank sampah tersebut, dengan begitu sampah yang awalnya tidak bernilai jual dapat memberikan manfaat dengan melalui pengelolaan terlebih dahulu.

2.1.2.3 Pengelolaan Bank Sampah

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah memiliki makna suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh serta berkelanjutan yang meliputi pengurangan serta penanganan sampah. Selain itu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 juga menjelaskan asas serta tujuan dari pengelolaan sampah yang mana diselenggarakan sesuai dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan serta nilai ekonomi. Dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan dan mengalihfungsikan sampah menjadi sumber daya.

Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara 3R *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), *recycle* (mendaur ulang) dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan pengelolaan sampah, pengelolaan bank sampah dapat dikatakan sama halnya dengan *recycle* (mendaur ulang), yaitu sampah yang sebelumnya telah terkumpul dipisahkan sesuai dengan kategorinya entah organik maupun anorganik agar dapat diproses oleh petugas bank sampah (Mawarni, 2021, p. 30). Dalam konteks pengelolaan sampah, bank sampah berperan sebagai salah satu strategi yang sejalan dengan prinsip daur ulang *recycle*. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) dengan cara memilah, mengolah, serta memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna.

Pada proses pengelolaan bank sampah, langkah awal yang dilakukan adalah pengumpulan sampah dari masyarakat. Sampah yang telah dikumpulkan kemudian dikategorikan berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik, seperti sisa makanan dan dedaunan, dapat diolah menjadi kompos atau

bahan bakar alternatif. Sementara itu, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, dan logam, dapat didaur ulang menjadi produk baru atau dijual kembali kepada pihak yang membutuhkan.

Pemilahan ini merupakan tahap yang krusial karena menentukan efektivitas proses pengolahan selanjutnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pengolahan. Bank sampah berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan masyarakat dengan industri daur ulang, sehingga sampah yang telah dikategorikan dapat diproses lebih lanjut oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk mengelolanya. Selain aspek lingkungan, pengelolaan bank sampah juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Melalui sistem tabungan sampah, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari sampah yang mereka setorkan. Hal ini tidak hanya mendorong kebiasaan memilah sampah, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, bank sampah bukan sekadar tempat penampungan sampah sementara, tetapi merupakan bagian dari sistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang mendukung konsep ekonomi sirkular. Keberlanjutan program ini bergantung pada edukasi, kesadaran masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga lingkungan.

2.1.2.4 Manajemen Bank Sampah

Pada umumnya cara kerja bank sampah mirip dengan bank konvensional lainnya, terdapat nasabah, terdapat pembukuan serta manajemen pengelolaannya, yang menjadi perbedaan antara bank sampah dengan bank konvensional lainnya adalah pada bentuk penyetorannya apabila bank konvensional nasabah menyetorkan sejumlah uang namun pada bank sampah ini yang disetorkan oleh nasabah adalah sampah yang memiliki nilai ekonomis, pengelola bank sampah harus seseorang yang kreatif dan inovatif agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Aryenti, 2011, p. 42).

Sampah yang kita hasilkan setiap hari apabila dibiarkan terus menerus maka hanya akan menjadi tumpukan yang tidak berguna dan tidak memiliki nilai

ekonomis, namun apabila dipilah, disetorkan pada bank sampah. Semua masyarakat dapat menabung pada bank sampah dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada pengelola, selanjutnya pengelola akan memberikan buku tabungan secara resmi. Setelah memiliki buku tabungan nasabah dapat langsung menabung sampah dengan membawa sampah yang telah dipilah dalam kondisi bersih dan kering. Tabungan dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing bank sampah (Aryenti, 2011, p. 43).

2.1.3 Mengurangi Sampah

2.1.3.1 Definisi Mengurangi Sampah

Pengurangan sampah merupakan upaya sistematis untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan oleh individu dan kelompok melalui berbagai strategi yang ditujukan untuk pencegahan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Tujuan pengurangan sampah adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Secara umum pengurangan sampah dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Recycle, Recycle*). “Pengurangan” mengacu pada tindakan yang bertujuan untuk mengurangi limbah, seperti: B. mengurangi penggunaan produk sekali pakai dan memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Daur ulang berfokus pada bahan daur ulang yang masih dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan akan bahan baru. Daur ulang adalah proses mengubah bahan menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali.

Selain pendekatan 3R, pengurangan sampah juga dapat dilakukan melalui edukasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memisahkan sampah dari sumbernya, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Melalui kesadaran masyarakat dan penerapan strategi yang efektif, pengurangan sampah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salah satu program yang dapat dilakukan untuk pengurangan sampah adalah dengan melalui bank sampah. Fokus utama yang perlu diperhatikan adalah praktik penggunaan kembali sampah yang dapat dilakukan dengan cara

menggunakan ulang seluruhnya maupun sebagian dari sampah sesuai dengan fungsi yang sama maupun yang berbeda namun tanpa melewati proses pengolahan terlebih dahulu.

2.1.3.2 Mengurangi Sampah

Sesuai yang telah dijabarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 20, yaitu;

Pengurangan sampah meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Pembatasan timbulan sampah;

Pada pembatasan timbulan sampah ini terfokuskan pada sampah plastik maupun barang sekali pakai yang mana marak digunakan dan juga menjadi penyebab timbulan sampah. Pembahasan timbulan ini bisa dilakukan dengan cara membawa wadah untuk bahan yang biasanya menggunakan plastik.

2) Pendaur ulangan sampah; dan/atau

Merupakan proses dalam mengubah bahan yang sudah terpakai menjadi bahan yang dapat digunakan lagi. Pada proses ini diantaranya yaitu pengumpulan, pemrosesan serta pemurnian limbah guna menghasilkan barang yang baru. Proses pendaur ulangan ini dapat membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam.

3) Pemanfaatan kembali sampah.

Merupakan penggunaan kembali bahan maupun barang yang masih bisa digunakan kembali setelah pemakaian awalnya. Dapat dicontohkan dengan menggunakan botol sebagai tempat pensil.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Pada yang dilakukan oleh Solikah (2017, p. 30), metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun tujuan dari penelitiannya adalah untuk menentukan timbulan serta karakteristik sampah di Kecamatan Sukun, menentukan kontribusi bank sampah terhadap timbulan dan pengumpulan sampah di Kecamatan Sukun serta menentukan biaya pengumpulan sampah dengan kontribusi bank sampah di Kecamatan Sukun. Pada penelitian tersebut terdapat hasil yaitu pengurangan sampah melalui bank sampah sesuai dengan kapasitas dari alat pengangkut sampahnya. Beberapa alat pengangkut sampah tersebut adalah gerobak

tarik, gerobak motor serta motor roda 3. Dengan adanya bank sampah pula dapat mengurangi ritasi per tahun.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aisha (2023, p. 70) menggunakan metode kualitatif tepatnya analisis data kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis pengaruh bank sampah terhadap jumlah sampah plastik di Indonesia. Menurut penelitian yang telah dilakukan Peran Bank Sampah selain mengurangi jumlah sampah plastik hingga 16 ribu ton sampah yang terkelola yang diantaranya adalah 12 juta ton sampah anorganik. Peran Bank Sampah juga memaksimalkan nilai dari suatu produk meskipun sudah menjadi sampah, yaitu dengan cara memberikan reward kepada masyarakat yang telah mengumpulkan sampah dan menyetorkan ke Bank Sampah. Sehingga dari pengelolaan Bank Sampah tersebut, adanya pemaksimalan nilai sampah yang kemudian menghasilkan manfaat berupa kenaikan ekonomi masyarakat hingga pemberdayaan manusia sebagai pekerja. Hasil dari penelitian ini adalah bank sampah memiliki pengaruh dalam pengurangan sampah plastik di Indonesia. Namun, tidak hanya berperan untuk mengurangi sampah saja melainkan peran bank sampah lainnya adalah dapat memaksimalkan produk yang sudah menjadi sampah atau sudah tidak dapat digunakan. Dengan peran tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta memberdayakan masyarakat sebagai pekerja.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ramdani, Taufik, & Fatonah (2020, p. 4) dengan metode penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk mengevaluasi keefektifan literasi lingkungan melalui bank sampah dan menganalisis potensi bank sampah dalam memperbaiki kualitas lingkungan di Negeri Hatu. Hasil dari penelitiannya adalah penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah melalui bank sampah belum begitu optimal. Namun, sudah ada beberapa masyarakat yang paham akan hal tersebut dan sadar mengenai program pengurangan sampah melalui bank sampah. Terbukti dari bank sampah yang dikelola oleh pengurus rumah pintar Hasoma Hatu mampu mengurangi timbulan domestik sebanyak 0,17% di wilayah negeri Hatu, Kec. Leihitu Barat, Kab. Maluku Tengah selama bulan September 2020. Angka pengurangan tersebut memang masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan peran ideal bank sampah. Idealnya

bank sampah mampu mengurangi minimal 30%-50% sampah sebelum dikirim ke Tempat pembuangan akhir. Masyarakat Negeri Hatu Maluku terbuka wawasannya mengenai lingkungan melalui rumah pintar Hasoma khususnya dampak dari bank sampah, sehingga dapat meningkatkan partisipasi kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Putri (2023) dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan tujuan penelitiannya adalah mengetahui tingkat partisipasi anggota dalam pengelolaan sampah, mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota bank sampah serta mengetahui besarnya penerimaan anggota bank sampah yang diperoleh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota Bank Sampah Wijaya Kusuma termasuk dalam kategori sedang ataupun kurang berpartisipasi. Adapun faktor yang mempengaruhinya persepsi mengenai kondisi alat, layanan serta motivasi anggota. Serta penerimaan yang diperoleh anggota Bank Sampah Wijaya Kusuma dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Metro Timur Kota Metro masuk ke dalam kategori sedang

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alur berpikir yang mana dijadikan untuk pola maupun landasan konsep peneliti dalam penelitiannya terhadap objek yang dituju, Sugiyono dalam (Bunbababan, 2022, p. 43). Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kerangka konseptual ini merupakan landasan yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

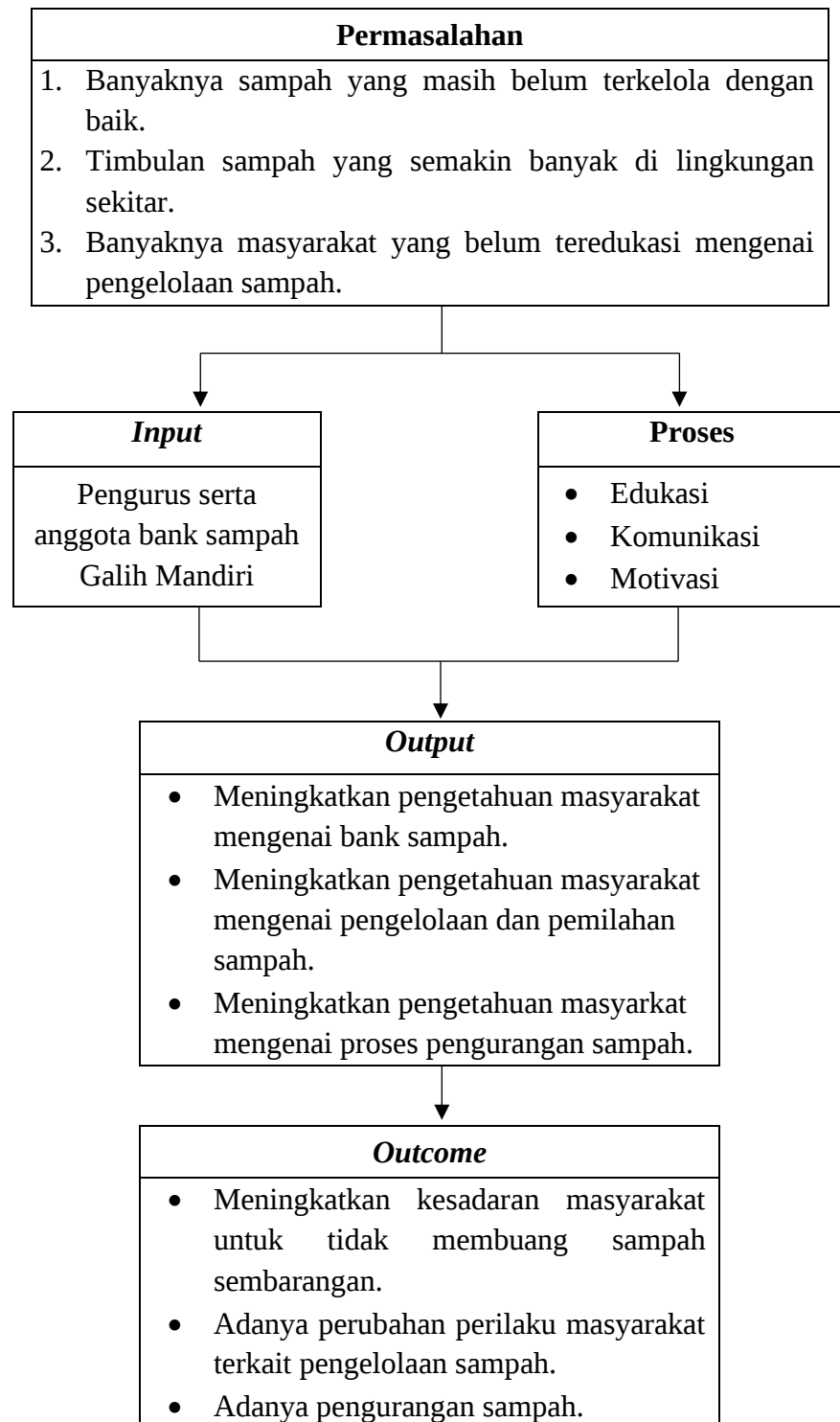
Pada kerangka konseptual penelitian ini berawal dari temuan peneliti mengenai permasalahan yang kerap dialami oleh masyarakat yaitu permasalahan mengenai sampah. Permasalahan sampah, yang meliputi pengelolaan, pemilahan, dan pembuangan sampah yang tidak terorganisir dengan baik, telah menciptakan dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, serta untuk mengeksplorasi solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah dengan cara yang lebih efektif. Sampah yang tidak terkelola dengan baik biasanya akan mengakibatkan adanya timbunan di lingkungan

sekitar. Timbulan mengenai sampah tersebut tentunya bukan merupakan capaian yang baik dan bisa dibiarkan begitu saja. Hal tersebut tentunya akan menjadi masalah yang besar apabila tidak segera ditangani dengan baik.

Kerangka konseptual ini dibangun berdasarkan teori-teori yang relevan, termasuk teori perilaku sosial, yang menyatakan bahwa perubahan perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Peneliti berusaha untuk memahami bagaimana pendekatan edukasi dan motivasi, melalui program seperti bank sampah, dapat mempengaruhi cara masyarakat dalam memperlakukan sampah mereka. Selain itu, kerangka ini juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang ada di masyarakat, serta faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan dukungan komunitas yang dapat memperkuat keberhasilan program penyuluhan dan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kelurahan Kahuripan, masyarakat mengalami permasalahan mengenai sampah yang belum terkelola. Masyarakat mulai tidak nyaman atas adanya timbulan sampah di lingkungan sekitar mereka, karena menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat memicu berbagai penyakit pula. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melalui bank sampah, dengan memberitahukan kepada masyarakat melalui penyuluhan yang didorong dengan adanya komunikasi yang baik serta motivasi kepada masyarakat. Selain itu juga dengan adanya praktik secara langsung mengenai pengelolaan sampah. Jika masyarakat mengikuti penyuluhan serta menjadi anggota bank sampah maka masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola sampah.

Berdasarkan pada pemaparan diatas berikut merupakan kerangka konseptual pada penelitian Pengaruh Penyuluhan Bank Sampah untuk Mengurangi Sampah di Kelurahan Kahuripan.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: (Data Peneliti 2024)

2.4 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan penjabaran dari rumusan masalah yang harus terjawabkan. Pada pertanyaan penelitian diartikan sebagai petunjuk arah mengenai apa dan bagaimana suatu fenomena terjadi, tanpa adanya dugaan sementara atau sering disebut sebagai hipotesis (Supratiknya, 2014). Berdasarkan pada kerangka konseptual, didapatkan pertanyaan penelitian yaitu:

- 2.4.1 Bagaimana Penyuluhan Bank Sampah untuk Mengurangi Sampah di Kelurahan Kahuripan?
- 2.4.2 Bagaimana Proses Bank Sampah Galih Mandiri dalam Mengurangi Jumlah Sampah di Kelurahan Kahuripan?